

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Pada
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri**



OLEH

DIDI SUHARYADI
10875004527

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nama: Didi Suharyadi
NIM : 10875004527

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan pada Bulan Januari 2012 yang di bimbing oleh Ibu Mustiqowati Ummul Msi sebagai pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah, dengan indikator proses Pendaftaran dan Pendataan, Proses Pemungutan, dan Proses penyuluhan yang diambil dari data primer dan data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah analaisis deskriptif yaitu data yang terkumpul di analisis dengan menguraikan serta mengaitkan dngan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Hipotesis yang penulis ajukan adalah “Diduga Kurang Optimalnya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah” disebabkan karena rendahnya proses Pendaftaran dan Pendataan, Proses Pemungutan, dan Proses penyuluhan”, dengan ditentukan sistem pelaksanaan yang tepat maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu akan dapat mencapai sasaran-sasaran dari pelaksanaan optimalisasi pemungutan atau efektifitas optimalisasi emungutan pajak tersebut. Dari analisis data yang di peroleh hasil sebagai berikut : dari indikator Proses Pendaftaran dan Pendataan, Proses Pemungutan, dan Proses penyuluhan tanggapan responden mengenai optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamtan Rambah, Tanggapan responden mengenai Pendaftaran dan Pendataan PBB di Kecamatan Rambah, tanggapan responden mengenai Pemungutan PBB di Kecamatan Rambah, 20,75 atau 17,74 % responden mengatakan Baik, 60,25 atau 51,50 % responden mengatakan Cukup Baik, dan selebihnya 36,75 atau 31,41 % responden mengatakan Kurang Baik. Jadi mayoritas tanggapan responden pada penelitian ini adalah Cukup Baik. tanggapan responden mengenai Penyuluhan PBB di Kecamatan Rambah, 21 atau 17,95 % responden mengatakan Baik terhadap penyuluhan PBB, 54,25 atau 46,37 % responden mengatakan Cukup Baik terhadap penyuluhan PBB, dan selebihnya 45 atau 38,46 % responden mengatakan Kurang Baik terhadap penyuluhan PBB. Jadi mayoritas tanggapan responden pada penelitian ini adalah Cukup Baik. Kesimpulan dari pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dari data diatas adalah Cukup Baik.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II : TELAAH PUSTAKA | |
| 2.1 Pengertian Pajak | 12 |
| 2.2 Optimalisasi Pemungutan | 14 |
| 2.3 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak | |
| Bumi Dan Bangunan | 24 |
| 2.4 Klasifikasi Pajak | 25 |
| 2.5 Pajak Pandangan Dalam Islam | 28 |
| 2.6 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan..... | 30 |
| 2.7 Dasar Hukum Pengenaan Pajak | |
| Bumi dan Bangunan | 32 |
| 2.8 Defenisi Konsep | 35 |
| 2.9 Konsep Operasional..... | 37 |
| 2.10 Variabel Penelitian | 38 |
| 2.11 Hipotesis | 38 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.1 Lokasi Penelitian | 39 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 39 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 42 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 3.5 Analisis Data | 43 |

BAB IV : GAMBARAN UMUM

| | |
|--|----|
| 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu | 44 |
| 4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu | 50 |
| 4.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu | 51 |
| 4.4 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu | 52 |
| 4.5 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu | 53 |
| 4.6 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu..... | 53 |

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 5.1 Identitas Responden | 55 |
| 5.2 Hasil Penelitian..... | 60 |
| a. Proses Pendaftaran dan Pendataan..... | 60 |
| b. Proses Pemungutan | 65 |
| c. Proses penyuluhan | 71 |
| 5.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu | 77 |

BAB VI : PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 6.1 Kesimpulan..... | 79 |
| 6.2 Saran-saran | 81 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIOGRAFI

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| I.1 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu..... | 6 |
| I.2 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah | 7 |
| I.3 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah Yang Telah Membayar PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2011 | 8 |
| III.1 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah | 41 |
| III.2 Jumlah Populasi dan Sampel di Kecamatan Rambah | 43 |
| IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin | 47 |
| IV.2 Sarana Pendidikan di kabupaten Rokan Hulu | 48 |
| IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kabupaten Rokan Hulu | 49 |
| IV.4 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Rokan Hulu | 50 |
| IV.5 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu | 54 |
| V.1 Jumlah Responden dan Petugas Pemungut di Kecamatan Rambah Menurut Jenis Kelamin..... | 56 |
| V.2 Jumlah Responden dan Petugas Pemungut di Kecamatan Rambah Menurut tingkat umur | 57 |
| V.3 Jumlah Responden dan Petugas di Kecamatan Rambah Menurut Tingkat Pendidikan | 58 |
| V.4 Jumlah Responden dan Petugas di Kecamatan Rambah Menurut mat pencarian | 59 |
| V.5 Tanggapan Responden Tentang Pemungutan PBB di Kecamatan Rambah..... | 60 |
| V.6 Tanggapan Responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan | |

| | | |
|-------------|--|----|
| | Yang Tidak Mendaftarkan Objek Pajaknya Melalui Petugas Kecamatan Rambah | 61 |
| V.7 | Tanggapan Responden Tentang Pihak Kecamatan Telah Melakukan Pendaftaran Atas Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah | 62 |
| V.8 | Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Pencatatan Tentang Wajib Pajak PBB Yang Ada di Kecamatan Rambah | 63 |
| V.9 | Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pendaftaran dan Pendataan PBB di Kecamatan Rambah..... | 64 |
| V.10 | Tanggapan Responden Tentang Pemungutan PBB Dilakukan Oleh Kolektor Yang Berwenang Terhadap Wajib Pajak di Kecamatan Rambah..... | 66 |
| V.11 | Tanggapan Responden Tentang Prosedur Dalam Pemungutan PBB Wajib Pajak Mampu Mengikutinya di Kecamatan Rambah | 67 |
| V.12 | Tanggapan Responden Tentang Hambatan Yang di alami Oleh Petugas/Kolektor Pada Saat Pemungutan Pajak di Kecamatan Rambah | 68 |
| V.13 | Tanggapan Responden Tentang Peraturan Pemungutan Yang Dilakukan Oleh Petugas Kecamatan Rambah | 69 |
| V.14 | Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pemungutan PBB di Kecamatan Rambah | 70 |
| V.15 | Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh Petugas Terhadap Wajib Pajak PBB di Kecamatan Rambah | 71 |
| V.16 | Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Bisa Memberikan Kesadaran Wajib Pajak PBB di Kecamatan Rambah | 72 |
| V.17 | Tanggapan Responden Tentang Manfaat Yang Dirasakan Dari Penyuluhan di Kecamatan Rambah | 73 |
| V.18 | Tanggapan Responden Tentang Berapakah Menurut Saudara Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh petugas PBB Di Kecamatan Rambah | 74 |
| V.19 | Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Penyuluhan PBB | |

di Kecamatan Rambah 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan pada masa sekarang ini hendaknya harus lebih di arahkan pada ekonomi Indonesia yang mandiri. Kemandirian ini juga meliputi kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Dan untuk memajukan pembangunan diperlukan dana pembangunan yang mandiri untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu dalam rangka penyelegaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan

Undang-undang. Dengan demikian, pemungutan ajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Salah satu cara menutupi pengeluaran-pengeluaran itu adalah diperoleh dari sektor pajak. Dimana pajak merupakan sumber terpenting dari segi penerimaan Negara didalam pembiayaan pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan pemerintah. Hal ini dapat kita lihat didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah salah satu sumber penerimaan Negara yang menjadi tumpuan dan harapan untuk dapat direalisasikan diluar penerimaan minyak dan gas bumi.

Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan/keuntungan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kedalam pajak Negara yang dipungut oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Sesuai pasal 23 ayat 2 UUD 1945 Amandemen yang berbunyi: bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang. Jadi ketentuan

perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak boleh ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagian besar masalah Administrasi Negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan masyarakat tersebut. Disinilah letak hubungan antara optimalisasi pemungutan pajak dengan administrasi negara, dimana para administrator dituntut untuk mampu menyelesaikan persoalan bagaimana cara agar pemungutan pajak bisa dioptimalkan demi terciptanya kemakmuran bagi para masyarakatnya.

Peranan aparat Pemerintah Daerah, khususnya para Camat dan Kepala Desa/Lurah sangat penting dalam upaya mengoptimalkan dan menggerakkan wajib pajak untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping hal tersebut peranan camat diperlukan sekali untuk pengawasan alur penerimaan PBB dari wajib pajak sampai ketempat pembayaran.di kecamatan rambah yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu yang seperti Kecamatan lainnya harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan PBB agar seluruh warganya yang menjadi wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar PBB.

Permasalahan yang timbul adalah adanya satu dilema yang dilihat dari sisi negara atau daerah yang melakukan pemungutan, maupun dari sisi pembayar pajak. Di satu sisi, negara menginginkan dana pajak yang dipungut sebisa mungkin optimal dan mencapai target sehingga negara dapat melakukan

pembangunan. Namun, di sisi lain, masyarakat pembayar pajak tidak seluruhnya melaksanakan kewajiban tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat sebagai wajib pajak yang perekonomiannya bagus semua dan ada juga perekonomiannya dibawah standar, usahkan untuk bayar pajak untuk makan sehari-hari saja mereka sulit dan disamping itu pengetahuan/pemahaman mereka masih kurang terhadap pentingnya membayar pajak, sehingga penerimaan negara berkurang. Kondisi ini memang tidak dapat disangkal. Masih ada orang yang menganggap bahwa tidak ada gunanya membayar pajak karena tidak ada manfaat yang diperoleh dari pemerintah. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, bagaimanapun, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa memang pajak sudah diperuntukkan dengan benar. Bila tidak, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri.

Untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sumber Non migas, maka sistem perpajakan juga terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan harus mampu dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Semua ini diarahkan agar kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumbe-sumber dalam negeri makin meningkat.

Satu hal perlu dicermati, bahwa tidak tercapainya Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditargetkan untuk daerah kabupaten Rokan Hulu ini disinyalir belum optimalnya mekanisme kerja pihak Dispenda selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga

satuan unit kerja terkait dengan unit kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum mampu mencapai standar penerimaan sesuai targetnya.

1. Tidak terkumpulnya sumber-sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan oleh petugas dilapangan, sehingga ditemui beberapa wajib pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini belum terdaftar dan terdata oleh petugas dengan optimal.
2. Masih ditemui Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban membayar Pajak baik dari segi jumlah maupun batas waktu yang telah ditetapkan dengan baik, sehingga mempengaruhi kurang lancarnya proses administrasi perpajakan.
3. Ketentuan tarif pajak sebesar 20 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas setiap Wajib Pajak yang terdapat pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 belum dapat diterapkan sepenuhnya karena selain proses pemungutannya tidak berjalan dengan baik juga kondisi wajib pajak di Kabupaten Rokan Hulu masih merupakan menengah kebawah secara ekonomi.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian subsistem yang terdapat dalam organisasi itu sendiri, menurut S.P Siagian (2002:448) terdiri atas struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

Pandangan diatas menyiratkan bahwa proses organisasi adalah merupakan rangkaian dari keseluruhan aktifitas organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, sedangkan proses organisasi berlangsung berdasarkan sistemika, prosedur dan tata kerja yang telah dianalisis sehingga memungkinkan penciptaan efisiensi tujuan organisasi.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bukan semata-mata tugas dari pada pegawai kantor pajak saja tetapi melalui kerja sama aparat pemerintah daerah maupun pejabat yang terkait, dan tidak terlepas dari kerjasama dari masyarakat Wajib Pajak sendiri untuk membantu kelancaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Riau, adalah suatu daerah yang juga berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan dimana dalam penerimaannya belum mencapai target yang diinginkan.

Tabel 1.1
Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PBB
Kabupaten Rokan Hulu

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|------------------|------------------|------|
| 1. | 2009 | 6.731.053.871,00 | 3.432.837.474,00 | 51 % |
| 2. | 2010 | 6.983.977.104,00 | 3.422.148.781,00 | 49 % |
| 3. | 2011 | 7.245.302.655,00 | 3.840.010.407,00 | 53 % |

Sumber: Kantor Dispenda Rokan Hulu 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atau bagi hasil PBB telah memberikan kontribusi yang potensial kepada Kabupaten Rokan Hulu walaupun realisasi penerimaannya mengalami ketidak stabilan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan pada tabel diatas yakni adanya peningkatan dan penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kecamatan Rambah terdiri dari 11 desa dan 3 kelurahan yang telah memberikan kontribusinya kepada daerah, hal ini dapat dilihat pada Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.2
Targt Dan Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Rambah

| No. | Tahun | Target (dalam rupiah) | Realisasi (dalam rupiah) | % |
|-----|-------|--------------------------|-----------------------------|------|
| 1. | 2009 | 225.414.063,00 | 109.352.547,00 | 48 % |
| 2. | 2010 | 388.127.879,00 | 171.418.654,00 | 44 % |
| 3. | 2011 | 403.573.931,00 | 197.751.226,00 | 49 % |

Sumber : Kantor Dispenda Rokan Hulu 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan telah memberikan kontribusi yang potensial kepada Kabupaten Rokan Hulu walaupun realissi penerimaannya mengalami ketidak stabilan pendapatan dari tahun ketahun. Hal ini ditunjukkan pada tabel diatas yakni adanya peningkatan penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 3 tahun ini kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2011 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami sedikit kenaikan yaitu hanya 49 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 44%.

Selanjutnya dilihat pula jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang telah terdaftar dan terdata oleh petugas pada sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2011. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah yang telah membayar PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2011

| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Wajib Pajak (Orang) |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Rambah Tengah Utara | 413 |
| 2. | Rambah Tengah Hilir | 844 |
| 3. | Rambah Tengah Hulu | 794 |
| 4. | Rambah Tengah Barat | 981 |
| 5. | Menaming | 408 |
| 6. | Pasir Baru | 673 |
| 7. | Sialang Jaya | 327 |
| 8. | Tanjung Belit | 500 |
| 9. | Koto Tinggi | 2.187 |
| 10. | Suka Maju | 1.332 |
| 11. | Pasir Maju | 561 |
| 12. | Pematang Berangan | 782 |

| | | |
|---------------|------------------|---------------|
| 13. | Babussalam | 577 |
| 14. | Pasir Pengaraian | 1.258 |
| Jumlah | | 11.637 |

Sumber : Kantor Dispenda Rokan Hulu 2012

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas pula bahwa jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kecamatan Rambah saat ini memiliki 14 desa/kelurahan dengan jumlah sebesar 39.631 jiwa.

Dengan demikian penerimaan/pemungutan harus dioptimalkan lagi. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengambil judul ***“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gejala yang ada diatas dapat dirumuskan pernyataan peneliti yakni *“Bagaimanakah Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011”*.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah tahun 2011.

1.4 Kegunan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan untuk kepentingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.
- b. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian yang sama.
- c. Diharapkan menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berminat dalam masalah perpajakan dan cara-cara yang paling baik untuk peningkatan penerimaannya.
- d. Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang melandasi pembahasan proposal skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian hipotesis, dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian, seperti Lokasi Penelitian, Karakteristik dan Demografi.

BAB V : ANALISIS DATA

Dalam Bab ini akan membahas hasil adari penelitian tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Sebagai manusia memiliki falsafah hidup berdasarkan agama, bahwa semua kehidupan adalah anugerah tuhan. Sehingga patut menyerahkan sebagian pendapatannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk negara berhak untuk berusaha dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara.

Secara umum pengertian pajak dirumuskan oleh Soemitro (1997:3) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Senada dengan itu M. J. H. Smeeths (dalam Bohari, 2001:23) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang berhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat

ditujukan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya NJ. Feldman (dalam Waluyo, WirawanB. Ilyas, 2003;4) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditatapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Soeparman dalam Waluyo, Wirawan B. Ilyas, (2003;4) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarakan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publik investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak terkait atas pajak yang diberikan pemerintah, yang sifatnya dapat dipaksakan (dalam arti diharuskan) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk membiayai pembangunan dalam hal kesejahteraan umum. Sehingga pajak terlihat berbeda dengan redistribusi yakni dalam hal sifat memaksa serta aspek biasa yang dapat dinikmati dalam redistribusi.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan daerah demi menunjang pendapatan pajak daerah guna mencapai terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yakni melalui berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

2.2 Optimalisasi dan Pemungutan

Optimalisasi menurut kamus bahasa indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; 705;1991) adalah pengoptimalan atau proses mnjadikan paling baik. Sedangkan pemungutan menurut poerwadarminta adalah perbuatan mengambil sesuatu (Poerwadarminta 298;1993). Kemudian didalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan diharapkan bahwa masyarakat menyadari akan pentingnya membayar pajak, karena pajak yang kita bayar tersebut akan dikembalikan lagi kepada kita secara tidak langsung dan hasilnya pun akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Disinilah yang membedakan antara pajak dan redistribusi, bahwa pajak yang kita bayar bukan sekedar yang membayar yang menikmati `hasilnya tapi

seluruh lapisan masyarakat walaupun ia tidak ikut membayar pajak, sedangkan redistribusi yang menikmati hasilnya hanya yang membayar saja.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor perpajakan menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

Adapun pemungutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemungut PBB oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak yang sudah terdata di Dispenda Kabupaten Rokan Hulu secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

a. Azas-azas Pemungutan Pajak

Azas-azas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan alas, dasar, atau tumpuan untuk meenjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan azas-azas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh azas-azas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan azas yang masih diperlukan lagi pemahaman atas perlakuan tertentu.

Adam Smit dalam Bohari, (2001;41) mengemukakan empat azas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four canons taxation*” atau disebut “*the four taxims*” dengan uraian sebagai berikut :

1. Equality (azas persamaan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Certainty (azas kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terhutan, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience of Payment (azas menyenangkan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. Low Cost of Collection (azas efisiensi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian juga bebanyang dipikul oleh wajib pajak.

Masalah keadilan pemungut pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan Vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Selanjutnya Undang-undang Pajak Nasional memiliki prinsip-prinsip dalam sistem pemungutan pajak seperti yang tertuang dalam penjelasan dari Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Nasional merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan.
- b. Tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut.
- c. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip diatas, maka wajib pajak diwajibkan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan pemerintah hanya sebagai pembina, peneliti dan pelaksana terhadap kewajiban pajak tersebut.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dapat dihilangkan. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab di masyarakat.

b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka telah disusun rencana pembiayaan tersebut dalam bentuk RAPBD setiap tahunnya dengan mengakumulasikan berbagai sumber pendapatan atau subsidi lainnya, apalagi daerah otonom yang dituntut kemampuannya untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan modal pembiayaan sendiri pula.

Artinya pemerintah daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat di daerah, yang menurut pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Restribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Prof. Dr. Rahmat Soemitro, SH dalam Sri Pudjatmoko (2002:2) mengatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapertasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada Negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.

Prof. PJA. Adriani juga memberikan definisi tentang pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Jenis-jenis pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Negara

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000

b. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Dasar hukum pengenaan pajak PPndan PPnBM adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000.

c. Pajak atas Dokumen(Bea Materai)

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No.13 Tahun 1985.

d. Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB).

e. Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pajak Hotel. | 5. Pajak Penerangan Jalan |
| 2. Pajak Restoran. | 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C |
| 3. Pajak Hiburan. | 7. Pajak Parkir |
| 4. Pajak Reklame. | 8. Pajak Lain-lain |

Dilihat dari penjelasan di atas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini pun dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2005 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. 10% untuk Pemerintah Pusat
2. 90% untuk Daerah.

Dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar 90% bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah provinsi bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b. 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- c. 9% untuk membiayai pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah.

Sedangkan 10% bagian pemerintah pusat dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.
- b. 3,5% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. (Liberty Pandiangan, 2002:24)

Dapat ditegaskan, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan obyek

Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalangkan sumber pembiayaan pembangunan.

Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan/keuntungan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang penggunaannya diperuntukan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.3 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Ketentuan yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan indonesia adalah sistem *Self Assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di indonesia tahun 1983. Pemungutan sistem ini juga dianut dalam undang-undang No. 18 tahun 1987 dan undang-undang No. 34 tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak saat ini menggunakan tiga sistem sebagai mana tertera dibawah ini:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan daerah atau dokumen lain yang disempurnakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *With holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak

pada sumbernya, antara lain (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *Self assessment* dan *Official assessment*. Hal ini terdapat dalam ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 1997 pasal 7, bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dipakai sistem *Self assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan untuk daerah dan sebagian lagi untuk pemerintah pusat yang dibagi melalui kas negara. Yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, oleh sebab itu keadaan atau status orang, badan yang dijadikan subjek tidak penting/tidak mempengaruhi besarnya pajak (*Richard A. Musgrave, Peggy Musgrave, 2000*).

2.4 Klasifikasi Pajak

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang (*Bohari, 2001*).

Faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak:

1. Bumi/tanah

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan
- e. Dan lain-lain

2. Bangunan

- a. Bahan bangunan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan
- e. Dan lain-lain

Adapun klasifikasi pajak secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau diimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau diimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penambahan Nilai (PPn).

2. Menurut Sifatnya

- a. *Pajak subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. *Pajak objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. *Pajak pusat*, yaitu pajak yang harus dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tang negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. *Pajak daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- Pajak propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak kabupaten/kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam

Adapun mengenai pajak dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At-Taubah ayat 29).

Yang dimaksud dengan jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam, dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Pembayaran pajak yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Menurut Didin Hafidhudin (2002 : 61-63) ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Firman Allah SWT surah Al-Baqarah : 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah

SWT, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab , nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Baqarah : 177).

Imam Al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“..... *Dan memberikan hartanya yang dicintai.....*”) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin khususnya, walaupun sudah menunaikan zakat tetapi memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam Al-Qurthubi juga mengemukakan sebuah hadits riwayat Daruquthni dari Fathimah Binti Qayis, Rasulullah SAW bersabda, *”Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat.”*

(Hafidhudin, 2002: 24)

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan bersama dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

Kedua, solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa.

2.6 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan disini adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Tempat penmpungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak;
8. Fasilitas lainnya yang memberikan manfaat.

Sedangkan subjek Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

1. Mempunyai hak atas bumi,
2. Memperoleh manfaat atas bumi,
3. Memiliki atau menguasai bangunan,
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No. 28 tahun 2009 dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak.

2.7 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

a) Adapun dasar hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. *Undang-undang No.28 tahun 2009, tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan*
2. *Undang-undang No.17 Tahun 2000, Pajak Penghasilan (PPh)*
3. *Undang-undang No. 18 Tahun 2000 PPN dan PPnBM.*
4. *Peraturan Bupati (Perbup) No. 15 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan.*
5. *Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang Pembagian Tentang Keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/2000 tentang*

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b) Dasar Pengenaan atau Penetapan dan Cara Menghitung Pajak dijelaskan:

1. Dasar pengenaan atau penetapan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
 - b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
 - c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
2. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang cukup besar, maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat ditetapkan setahun sekali, penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

3. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (seuluh juta rupiah), sesuai pasal 80 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut :
- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
 - b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(Undang-undang No. 28 Tahun 2009).

Agar penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Objek Pajak mengandung unsur keadilan, maka atas objek perlu diadakan Klasifikasi atas bumi dan bangunan tersebut. Untuk menentukan klasifiikasi bumi dan bangunan tersebut perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bumi yang meliputi letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan.
- b. Bangunan yang meliputi bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. *(Undang-undang No. 28 Tahun 2009.)*

Diketahui bahwa aspek yang terlibat dalam perpajakan secara umum adalah meliputi unsur-unsur:

1. Pemerintah (dalam hal ini merupakan pegawai/petugas yang ada hubunganya dengan pajak)
2. Masyarakat (wajib pajak)
3. Undang-undang
4. Kepentingan Umum

Bentuk jalinan hubungan perpajakan antara pemerintah dan masyarakat diatur dalam Undang-undang perpajakan agar masyarakat mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem Perpajakan yang sedang dijalankan dalam Negara. Dalam menyusun Undang-undang perpajakan secara umum selalu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan pelaksanaan pemungutan pajak oleh Negara yang berjalan lancar.
- b. Adanya jaminan hukum yang tegas bagi para wajib pajak.
- c. Adanya jaminan kerahasiaan mengenai orang pribadi/badan selaku wajib pajak.

(Rimsky K. Judisseno; 1999; 10-110).

Mengingat bahwa pajak merupakan sumber yang paling penting bagi pembiayaan pembangunan, oleh sebab itu diperlukan usaha-usaha untuk melakukan intensifikasi pemungutan. *Richard A. Musgrave dan Peggy Musgrave* mengemukakan keberhasilan pembiayaan pembangunan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan, yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta sikap dan kemampuan para aparat pajak dalam melaksanakan fungsinya dilapangan. Kesiediaan untuk membayar pajak terutama tergantung pada masalah tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan masyarakat, maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui dua hal yakni dengan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakatnya, serta dengan meningkatkan kualitas aparat perpajakan, sehingga

segala manipulasi perpajakan dapat dihindari. (*Richard A. Musgrave dan Peggy Musgrave;1994;140*)

2.8 Defenisi Konsep

Karena pada dasarnya defenisi konsep ini adalah konsep peneliti sebagai acuan dalam penelitian, adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah:

1. Optimalisasi adalah suatu proses atau acara pembuatan untuk mengoptimalkan (menjadi paling baik/paling tinggi) pemungutan PBB.
2. Pemungutan adalah suatu proses atau perbuatan mengambil PBB.
3. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang meliputi tanah dan bangunan tempat atau usaha dimana sebagian penerimaan merupakan pendapatan daerah.
4. Optimalisasi pemungutan PBB adalah suatu proses atau cara untuk menjadikan pemungutan lebih baik atau optimal.

Adapun optimlisasi pemungutan PBB Dispenda Rokan Hulu adalah:

- a. Pemberian pengarahan, masukan mengenai PBB yang diberikan aparat Dispenda bersama-sama dengan KP. PBB, yaitu:
 1. Yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan selama 3 hari yang isinya berupa pendalaman materi bagi petugas pemungut dimana nantinya bisa bermanfaat bagi petugas pemungut itu sendiri.
 2. Monitoring kelapangan

Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat Dispenda Rokan Hulu bersama-sama dengan aparat KP. PBB sekaligus memberikan pembinaan kepada petugas pemungut.

3. Bulan bakti penyuluhan

Bulan bakti adalah semacam kegiatan besar yang dilakukan oleh Dispenda Rokan Hulu bersama-sama dengan aparat Camat sekaligus memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tujuannya untuk merangsang masyarakat membayar PBB.

4. Penegasan SK Bupati melalui Camat dimaksudkan agar kolektor bisa bekerja lebih efektif dan efisien.

b. Masyarakat Wajib Pajak.

Untuk melihat masyarakat wajib pajak dalam hal pemungutan/penyetoran yang berlangsung apakah pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut/kolektor sudah optimal berdasarkan upaya pengoptimalan diatas dapat dilihat sejauh mana kesadaran masyarakat untuk membayar dan kemudian dapat dilihat sejauh mana penerapan yang dilakukan oleh aparat petugas dengan melihat kepada tanggapan masyarakat mengenai pelayanan penyerahan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) kepada wajib pajak.

2.9 Konsep Operasional

Adapun prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu yang mana prosedur ini di tetapkan oleh kepala daerah dimana usaha

tersebut berada. adapun prosedur yang harus ditempuh dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Proses Pendaftaran dan Pendataan : wajib pajak mendaftarkan dirinya kepada petugas dalam praktek umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, untuk dukukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Proses Penyuluhan : memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tujuannya untuk merangsang masyarakat membayar PBB.
3. Proses Pemungutan : pemungutan PBB tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan PBB tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektor dengan menerbitkan (SK) kolektor dalam hal pemungutan pajak tersebut.

Dengan demikian, rangkaian mekanisme kerja yang harus dioptimalkan pihak Dispenda Kabupaten Rokan Hulu sebagai kebijaksanaan yang diambil dalam peningkatan penerimaan PBB di Kabupaten Rokan Hulu harusnya adalah merupakan suatu kegiatan manajemen dengan menggerakkn seluruh satuan/unit.

Lebih lanjut pelaksanaan dari Undang-undang No. 28 Tahun 2009 ini berorientasi pada pelaksanaan fungsi penggerakan dalam organisasi Dispenda Kabupaten Rokan Hulu, yakni suatu tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelpok suka berusaha dalam mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

2.10 Variabel Penelitian

Adapun Variabel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Proses Pendaftaran dan Pendataan
2. Proses Pemungutan
3. Proses penyuluhan

2.11 Hipotesis

Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan: *“Diduga Kurang Optimalnya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah” disebabkan karena rendahnya proses Pendaftaran dan Pendataan, Proses Pemungutan, dan Proses penyuluhan.*

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis adalah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan salah satu dari 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah terdiri dari 14 desa/ kelurahan.

1.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpilannya. (Sugiyono, 2005: 90).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah, Camat Rambah dan Ka. UPTD (Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) sebagai koordinator pemungutan Kecamatan Rambah dengan jumlah 17 orang, serta wajib pajak Kecamatan Rambah dengan jumlah 11.637 wajib pajak.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang memilki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. (Sugiyono, 2005: 91). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah

| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Wajib Pajak (Orang) |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Rambah Tengah Utara | 413 |
| 2. | Rambah Tengah Hilir | 844 |
| 3. | Rambah Tengah Hulu | 794 |
| 4. | Rambah Tengah Barat | 981 |
| 5. | Menaming | 408 |
| 6. | Pasir Baru | 673 |
| 7. | Sialang Jaya | 327 |
| 8. | Tanjung Belit | 500 |
| 9. | Koto Tinggi | 2187 |
| 10. | Suka Maju | 1332 |
| 11. | Pasir Maju | 561 |
| 12. | Pemaatng Berangan | 782 |
| 13. | Babussalam | 577 |
| 14. | Pasir Pengaraian | 1258 |
| Jumlah | | 11637 |

Sumber : Kantor Dispenda Rokan Hulu 2012

Pembagian sampel biasanya akan mempertimbangkan besar kecilnya populasi guna menetapkan sampelnya. Karena keadaan objektif peneliti hampir tidak memungkinkan bagi penulis untuk menjelaskan secara keseluruhannya,

maka penulis disini menetapkan jumlah sampel yang telah ditentukan tanpa mengurangi tingkat validitas dan realitas suatu penelitian. Disini penulis menggunakan dua karekteristik pengambilan sampel, untuk pengambilan sampel aparat/petugas penulis menggunakan sensus, karena petugas pemungut PBB yang ditunjuk oleh kepala daerah melalui SK yang seluruhnya berjumlah 17 orang kurang dari seratus. Untuk wajib pajak penulis menggunakan rumus Slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus selovin itu adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Dimana dengan jumlah populasi sebesar 11.637 orang, dan batas ketelitian yang digunakan sebesar 10% maka didapat sampel sebesar:

$$n = \frac{11.637}{1 + 11.637(0,01)}$$

$$n = \frac{11.637}{116,38}$$

$$n = 100$$

Jadi secara keseluruhan sampel penelitian ini berjumlah 100 responden, responden inilah yang menilai optimalnya poses pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2 : Jumlah Populasi dan Sampel di Kecamatan Rambah

| No | Keterangan | Populasi | Sampel | Persentase (%) |
|----|----------------------------------|----------|------------|----------------|
| 1. | Petugas pemungut PBB Kec. Rambah | 15 | 15 | 100% |
| 2. | Camat Rambah dan Ka. UPTD | 2 | 2 | 100% |
| 3. | Wajib pajak Kec. Rambah | 11.637 | 100 | 10% |
| | Jumlah | | 117 | |

Sumber : Kantor Dispenda Rokan Hulu 2012

1.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan, yaitu data yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan PBB di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari kantor-kantor yang ada hubungannya dengan penelitian ini.. Adapun kantor tersebut adalah kantor Dispenda , kantor Kecamatan Rambah.

1.4 Teknik Penumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, tujuan untuk mengadakan data-data yang mendukung permasalahan.
- b. Interview yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian
- c. Quisoner atau angket yaitu mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden.

1.5 Analisis Data

Setelah data-data atau bahan- bahan yang diperlukan, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaannya. Dari keseluruhan data yang diperoleh itu maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa secara Kualitatif (uraian) dan penulisan ini bersifat Deskriptif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Roka Hulu

a. Keadaan Georafis

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu secara geografis, terletak antara 100° - 101° Bujur dan 0° - 130° lintang Utara. Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 31°C - 32°C . Dilihat dari ketinggian beberapa daerah di Kabupaten Rokan Hulu dari permukaan laut berkisar anatara 70-86 meter. Daerah yang tinggi adalah Pasir Pengarayan yakni 86 meter dan yang terendah adalah Ujung Batu yakni 70 meter.

Berdasarkan pasal 2 dan penjelasan umum Alinia ka-3 UU RI No. 53 tahun 1999, wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah Eks wilayah kerja pembantu Kabupaten Kampar, wilayah I dengan luas $7.449.850\text{ km}^2$, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan XIII Koto Kampar dan Provinsi Sumatera Barat.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu terletak ditengah pulau Sum#atera sebelah Utara Bukit Barisan tepatnya pada posisi $0^{\circ} 25' 20''$ LU- $01^{\circ} 25' 41''$ LU dan $100^{\circ} 02' 56''$ - $100^{\circ} 56' 59''$ bervariasi dari daratan alluvial sampai dengan vulkanik yang terjal di bagian barat, bagian barat kemiringan lebih 40% dengan luas sekitar 99.135 Ha seluas 53.578 Ha kemiringan 15-40% sedangkan kemiringan 2-15% seluas 13.266 Ha selebihnya 360.943 Ha dengan kemiringan 0-2%. Daerah Rokan Hulu merupakan daerah daratan rendah sampai sedang yang terletak dibagian timur deretan Bukit Barisan dengan ketinggian berkisar 5-1125 dpl (dari permukaan laut).

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki tiga sungai besar disamping beratus-ratus sungai kecil yang dijadikan masyarakat sebagai sumber kehidupan sehari-hari yaitu Sungai Rokan Kanan, Sungai Rokan Kiri dan Sungai Batang Sosah yang bermuara ke Sungai Rokan bagian hilir dengan panjang lebih kurang 100 km, kedalaman rata-rata 6 meter serta lebar 96 meter.

Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Rokan Hulu terutama disebabkan oleh pendatang dari luar wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini tentunya

mengakibatkan semakin heterogennya keadaan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu. Baik dilihat dari segi Agama, Suku, Kebudayaan, dan lain sebagainya.

Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan dapat memicu terjadinya konflik. Sehingga dengan demikian maka pemerintah dibantu oleh pemuka masyarakat dan pemuka agama senantiasa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan hakekat perbedaan yang ada, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik

b. Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu faktor yang sangat penting didalam suatu proses kegiatan pembangunan. Hal ini mengingat bahwa kependudukan adalah subjek sekaligus objek dari pembangunan, dengan kata lain penduduk dapat merupakan potensi besar sebagai modal dasar, juga dapat merupakan permasalahan didalam pembangunan. Oleh sebab itu perlu kecermatan dan kebijaksanaan didalam penanganannya.

b.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk diwilayah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 523.577 Jiwa pada tahun 2011 dengan kepadatan penduduk berjumlah 44 Jiwa/Km² yang terdiri dari penduduk Laki-laki 270.286 Jiwa (51,62%) dan Wanita 253.291 Jiwa (48,38%).

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------|-----------|---------|
| | Laki- laki | Perempuan | |
| 1 | 270.286 | 253.291 | 523.577 |

Sumber Data: BPS Kabupaten Rokan Hulu 2012

a. Keadaan Penduduk Menurut Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan amat berguna di galakan oleh pemerintah baik negeri maupun swasta, baik formal maupun non formal. Masyarakat akan bisa cerdas dan menjadi maju untuk kehidupan bangsa dan negara, maka dari itu masyarakat sangat memerlukan pendidikan, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan sangat mutlak di perlukan, hal ini dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar tahun 1945 dalam halaman pertama pembukaan, dengan jelas menyatakan *“Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya”*.

Dibawah ini dapat dilihat jumlah sarana pendidikan di Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel. IV.2
Sarana Pendidikan di kabupaten Rokan Hulu

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|---------------|-------------------|------------|
| 1 | TK | 204 |
| 2 | SD/ MI | 367 |
| 3 | SMP/ MTS | 133 |
| 4 | SMA/ MA | 43 |
| 5 | SMK | 19 |
| 6 | Perguruan Tinggi | 1 |
| Jumlah | | 767 |

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan yang paling banyak dimiliki di Rokan Hulu adalah Sekolah Dasar sebanyak 367 SD. Sarana pendidikan SMA sebanyak 43, TK sebanyak 204, SMP sebanyak 133, serta Perguruan Tinggi sebanyak 1 buah.

Disamping itu jumlah rumah tangga secara keseluruhan tercatat 67.054 rumah tangga. Apabila dijumlahkan dengan jumlah penduduk, hal ini menunjukkan bahwa tiap kecamatan rata-rata setiap rumah tangga tercatat 4 jiwa per-rumah tangga.

b.2. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencarian

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya bekerja sebagai petani. Dengan demikian sektor ini memiliki peranan penting dalam menunjang pendapatan masyarakat. Sedangkan mata pencarian penduduk yang jumlahnya

relatif kecil adalah sektor pertambangan, sebanyak 19.126 Jiwa atau sekitar 8,51%. Untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kabupaten Rokan Hulu.

| No | Mata Pencarian | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) | |
|----|----------------------|---------------|----------------|-------|
| 1. | Sektor Pertanian | 169.309 | 30,82 | |
| 2. | Perdagangan dan Jasa | 89.008 | 17,42 | |
| 3. | Sektor Perhubungan | 52.358 | 10,32 | |
| 4. | Sektor Pertambangan | 47.122 | 8,51 | |
| 5. | Sektor Industri | 62.829 | 11,53 | |
| 5. | Jumlah | | 523.577 | 100 % |

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa sektor pertanian merupakan mata pencarian penduduk terbesar yaitu sebesar sekitar 169.309 Jiwa dari total keseluruhan jumlah penduduk bermata pencarian berpariasi di Kabupaten Rokan Hulu. Sisanya berada pada sektor perdagangan dan jasa, perhubungan, pertambangan, industri, ABRI dan PNS.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk membantu masyarakat dalam hal peningkatan hasil pertanian pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya meminjamkan modal kepada petani untuk meningkatkan usahanya dengan pembayarannya setelah usaha tersebut berhasil. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten melalui pemerintah kecamatan dan desa berusaha mengsosialisasikan koperasi unit desa kepada masyarakat tersbut. Permerintah juga memberikan subsidi pupuk bagi para petani sehingga harga pupuk terjangkau bagi para petani yang kurang mampu.

b. 3. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Rokan Hulu

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar memeluk Agama Islam, diman menurut pendataan yang penulis lakukan didaerah penelitian didapat data bahwa selain pemeluk agama islam ada sebagian masyarakar Kabupaten Rokan Hulu memeluk agama lain yang tersebar dibeberapa wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Rokan Hulu

| No | Jumlah pemeluk agama | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Islam | 471.219 | 90,40 |
| 2. | Kristen Protestan | 15.184 | 2,81 |
| 3. | Kristen Katolik | 26.179 | 5,04 |
| 4. | Lainnya | 9.424 | 1,75 |
| Jumlah | | 523.577 | 100% |

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012

1.2 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Undang – Undang 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 dan diresmikan oleh Gubernur Riau. Pada tanggal 5 Desember 1999 terbentuklah Kabupaten Rokan Hulu. Pada awalnya kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tandun, dan Dua Kecamatan Pembantu Yaitu Kecamatan Rambah dan Kecamatan Rantau Kasai. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian terus berkembang menjadi 16 kecamatan hingga sampai tahun 2011 ini.

Setelah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, maka terbentuklah beberapa dinas dan kantor yang salah satunya adalah Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 tentang organisasi dinas daerah kabupaten Rokan Hulu.

Organisasi perangkat daerah tersebut berubah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan antara pemerintah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka Dinas Pendapatan berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

4.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 15 Tahun 2008 pasal 408 tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi, bahwa dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah salah unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dibidang pendapatan dan penerimaan daerah, yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan dinas instansi lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Untuk menjalankan tugas diatas, Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan fungsi menurut peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2008 pasal 408 yang mana fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan perumusan Kebijakan-kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pengelolaan penerimaan dan pemungutan keuangan daerah.

4.4 Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

“Terciptanya Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Memadai Dengan Bertumpu Kepada Pendapatan Asli Daerah”

Dari Visi diatas tersebut terdapat beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan daerah yang meliputi seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah dana perimbangan dan penerimaan dari provinsi dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Yang memadai adalah mengupayakan jumlah penerimaan yang dapat memenuhi pembiayaan kegiatan rutin pembangunan dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya Visi Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bertumpu Kepada Pendapatan Asli Daerah maksudnya dari keseluruhan penerimaan diharapkan dukungan dari dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang kontribusinya dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu akan memjabarkan kedalam Misi yang lebih jelas. Karena Misi adalah merupakan suatu cita-cita atau tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan penerapan strategi yang pas,

maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu menentukan Misi sebagai berikut :

1. Mengamankan rencana penerimaan yang tertuang dalam APBD terutama Pos Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
2. Menggali seluruh potensi daerah dalam rangka menciptakan sumber pendapatan yang baru dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kontribusi pendapatan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah dari tahun ketahun.
4. Meningkatkan eksisitensi Dinas Pendapatan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

4.5 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu

Jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 65 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri dan pegawai honorer, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dbawah ini :

Tabel IV. 5

Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu

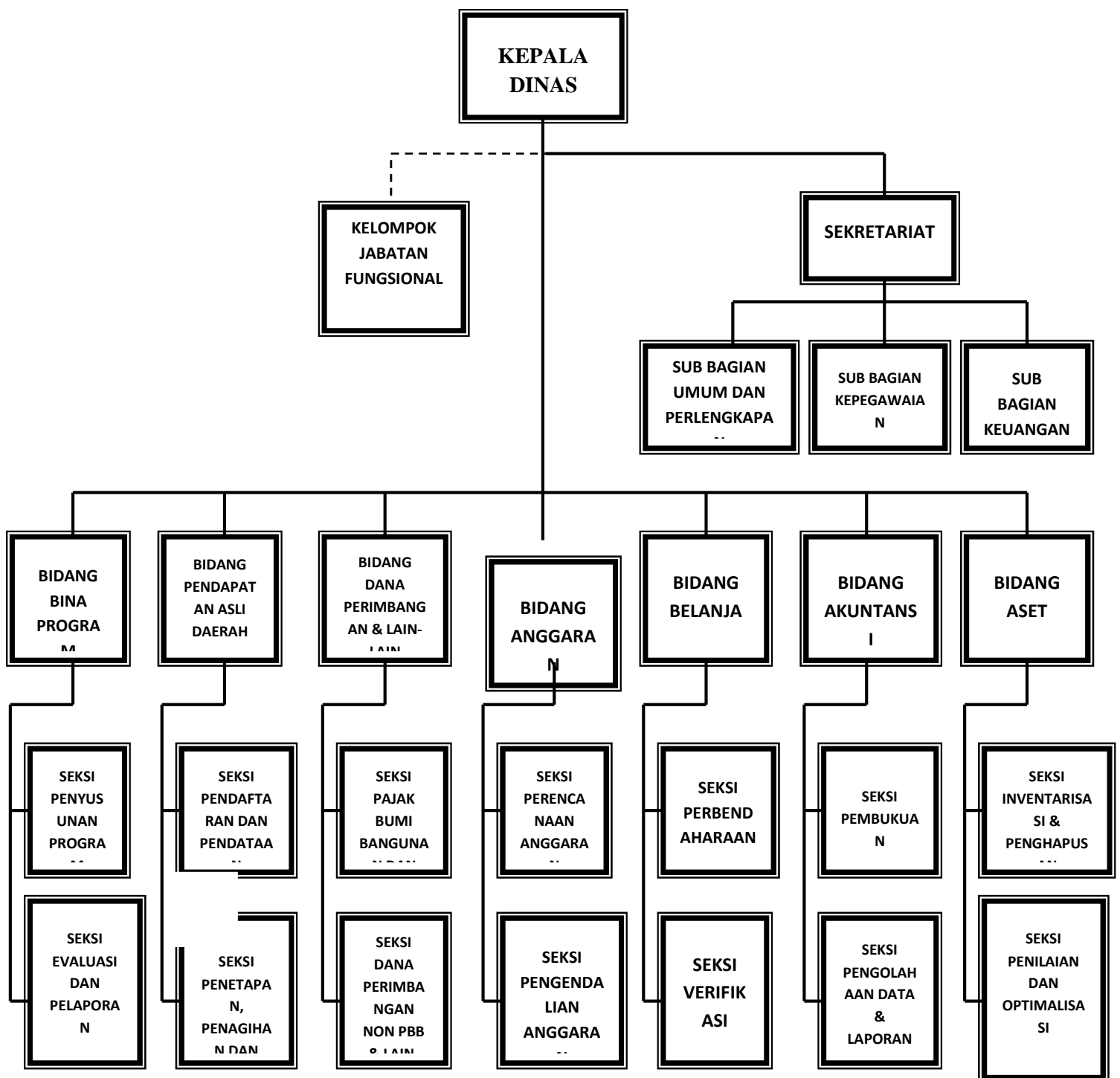
| No | Komposisi Pegawai | Jumlah Pegawai | % |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 48 | 73,85 % |
| 2. | Pegawai Honorer | 17 | 26,15 % |
| Jumlah | | 65 | 100 % |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Rokan Hulu 2012

1.6 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:

Gambar V.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu



BAB V

HASIL PENELITIAN

Pada akhir pembahasan ini akan dilakukan rekapitulasi terhadap terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Rambah, sehingga pada akhirnya diperoleh hasil data yang akurat terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

5.1 Identitas Responden

Untuk menunjang keobjektifan dan akuratnya data dalam penelitian sehubungan dengan Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu disajikan indentitas responden dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Rokan Hulu dan petugas pemungut di Kecamatan Rambah yang menyangkut tingkat pendidikan, tingkat umur dan jenis kelamin sehingga dengan penjabaran indentitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

Pemberian bobot skor pada setiap jawaban digunakan untuk menghitung prosentase yang nantinya menjadi tolak ukur dalam menentukan kriteria jawaban responden, untuk memperoleh prosentase tersebut digunakan rumus menurut Sugiyono (2007:109) pada buku *Metode Penelitian Administrasi* sebagai berikut:

$$\text{Perolehan Prosentase} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100 \%$$

Dimana :

Jumlah Nilai = Jumlah seluruh skor jawaban responden.

Berarti total keseluruhan dari hasil frekuensi (*f*)
jawaban x bobot.

Skor Tertinggi= Skor Ideal (*Kriterium*).

Berikut digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Jumlah Responden dan Petugas Pemungut di Kecamatan Rambah Menurut Jenis Kelamin.

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------|------------|--------------|
| 1 | Laki-Laki | 91 | 77,78 % |
| 2 | Perempuan | 26 | 22,22 % |
| Jumlah | | 117 | 100 % |

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat jumlah responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, dimana yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 91 orang atau 77,78 %. Sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 26 orang

atau 22,22 %. Jadi mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin Laki-laki.

Para responden diatas mempunyai umur berbeda-beda, untuk melihatnya berikut digambarkan indentitas responden dilihat dari tingkat umur sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Jumlah Responden dan Petugas Pemungut di Kecamatan Rambah Menurut Tingkat Umur

| No | Umur Responden | Jumlah | Persentase |
|---------------|----------------|------------|--------------|
| 1 | 20 – 30 Tahun | 23 | 19,69 % |
| 2 | 31 – 40 Tahun | 45 | 38,46 % |
| 3 | 41 – 50 Tahun | 37 | 31,61 % |
| 4 | 51 – Keatasnya | 12 | 10,26 % |
| Jumlah | | 117 | 100 % |

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat jumlah responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat umur, dimana yang berumur antara 20-30 tahun berjumlah 23 orang atau 19,69 %, berumur antara 31-40 tahun berjumlah 45 orang atau 38,46 % dan yang berumur antara 41-50 tahun berjumlah 37 orang atau 31,61 %, sedangkan yang berumur 51 keatas berjumlah 12 orang atau 10,26 %. Jadi mayoritas responden dalam penelitian ini berumur antara 31 - 40 Tahun.

Selanjutnya para responden diatas mempunyai tingkat pendidikan berbeda-beda, untuk melihatnya berikut digambarkan indentitas responden dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Jumlah Responden dan Petugas Pemungut di Kecamatan Rambah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | SD | 11 | 9,65 % |
| 2 | SLTP | 20 | 17,09 % |
| 3 | SLTA | 35 | 29,92 % |
| 4 | D3 (DIPLOMA) | 21 | 17,95 % |
| 5 | S1 (STRATA) | 24 | 20,51 % |
| 6 | S2 (MAGISTER) | 6 | 5,13 % |
| Jumlah | | 117 | 100 % |

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat jumlah responden pada penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan, dimana yang berlatar belakang pendidikan terkahir SD berjumlah 11 orang atau 9,65 %, SLTP berjumlah 20 orang atau 17,09 %, SLTA berjumlah 35 orang atau 29,92 %, berlatar belakang pendidikan terakhir D3 (Diploma) berjumlah 21 orang atau 17,95 %, berlatar belakang pendidikan terakhir S1 berjumlah 24 orang atau 20,51 %, dan berlatar belakang pendidikan terakhir S2 berjumlah 6 orang atau 5,13 %. Jadi mayoritas responden pada penelitian ini berlatar belakang terakhir SLTA.

Selanjutnya para responden diatas mempunyai mata pencarian berbeda-beda, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.4 : Jumlah Responden Menurut Mata Pencarian di Kecamatan Rambah

| No | Mata Pencarian | Jumlah | Persentase |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Petani | 56 | 47,86 % |
| 2 | Pedagang | 19 | 16,24 % |
| 3 | Wiraswasta | 15 | 12,82 % |
| 4 | PNS | 21 | 17,95 % |
| 5 | Dan lain-lain | 6 | 5,13 % |
| Jumlah | | 117 | 100 % |

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat jumlah responden pada penelitian ini berdasarkan mata pencarian, 56 atau 47,86 % bermata pencarian sebagai *Petani*, 19 atau 16,24 % bermata pencarian sebagai *Pedagang*, 15 atau 12,82 % bermata pencarian sebagai *Wiraswasta*, 21 atau 17,95 % bermata pencarian sebagai *PNS*, dan *Lain-lain* sebanyak 6 atau 5,13 %. Jadi mayoritas responden pada penelitian bermata pencarian sebagai *Petani*.

5.2 Hasil Penelitian

a. Proses Pendaftaran dan Pendataan

Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan wajib mendaftarkan dirinya kepada petugas dalam hal ini kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk mengetahui lebih jelasnya tanggapan tentang pemungutan PBB di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Tentang Pemungutan PBB di Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Baik | 28 | 23,93 % |
| 2. | Cukup Baik | 63 | 53,85 % |
| 3. | Kurang Baik | 26 | 22,22 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden mengatakan *Cukup Baik* tentang pemungutan PBB di Kecamatan Rambah sebesar 63 orang atau 53,85 %. yaitu petugas telah melaksanakan pemungutan PBB dengan ketentuan yang berlaku tetapi dilapangan petugas masih belum optimal dalam proses pemungutan PBB tersebut, ada diantara wajib pajak yang belum merasakan

pemungutan petugas secara langsung. ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* tentang pemungutan PBB di Kecamatan Rambah sebesar 26 orang atau 22,22 %. Alasannya yaitu petugas tidak melaksanakan pemungutan PBB melainkan hanya menunggu wajib pajak datang sendiri untuk membayar pajak tersebut sehingga wajib pajak menjadi enggan untuk membayar pajak.

Selanjutnya tanggapan responden tentang wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak mendaftarkan objek pajaknya melalui petugas Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Mendaftarkan Objek Pajaknya Melalui Petugas Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Baik | 21 | 17,95 % |
| 2. | Cukup Baik | 58 | 49,57 % |
| 3. | Kurang Baik | 38 | 32,48 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden sebesar 58 orang atau 49,57 %. mengatakan *Cukup Baik* tentang wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak mendaftarkan objek pajaknya melalui petugas Kecamatan Rambah sudah ditindaklanjuti dengan baik. Yaitu petugas telah memberi peringatan terhadap

wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku dengan mendaftarkan objek pajak secara tidak langsung wajib pajak telah memberikan kontribusi kepada daerah , dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 38 atau 32,48 %. yaitu petugas tidak pernah melakukan penyuluhan sehingga wajib pajak tidak mengerti bagaimana cara mendaftarkan objek pajaknya tersebut.

Selanjutnya tanggapan responden tentang pihak Kecamatan telah melakukan pendaftaran atas wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel V.7 berikut ini :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Tentang Pihak Kecamatan Telah Melakukan Pendaftaran Atas Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Baik | 19 | 16,24 % |
| 2. | Cukup Baik | 57 | 48,72 % |
| 3. | Kurang Baik | 42 | 35,90 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden mengatakan *Cukup Baik* sebesar 57 orang atau 48,72 %. tentang pihak Kecamatan telah melakukan pendaftaran atas wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Yaitu pihak kecamatan dalam hal ini petugas PBB yang ada di desa/kelurahan telah melakukan pendaftaran

terhadap wajib pajak yang ada di Kecamatan Rambah tetapi masih ada wajib pajak yang belum terdaftar dikarenakan tidak semua petugas melakukan pendaftaran wajib pajak, dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 42 atau 35,90 %. Yaitu pihak kecamatan dalam hal ini petugas PBB yang ada di desa/kelurahan tidak melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang ada di Kecamatan Rambah, sehingga banyak dari wajib pajak yang tidak terdaftar objek pajaknya yang berakibat berkurangnya sumber penerimaan daerah.

Selanjutnya tanggapan responden terhadap kegiatan pencatatan tentang wajib pajak PBB yang ada di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini :

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Pencatatan Tentang Wajib Pajak PBB Yang Ada di Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Baik | 24 | 20,51 % |
| 2. | Cukup Baik | 59 | 50,43 % |
| 3. | Kurang Baik | 36 | 30,77 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden mengatakan *Cukup Baik* sebesar 59 orang atau 50,43 %. Terhadap kegiatan pencatatan tentang wajib

pajak PBB yang ada di Kecamatan Rambah. Yaitu petugas kecamatan telah melakukan pencatatan dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih terlihat besar pajak tidak sesuai dengan keadaan objek pajak dilapangan, dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 36 atau 30,77 %. Yaitu petugas kecamatan tidak melakukan pencatatan yang baik atau asal-asalan terhadap objek pajak, terdapat perbedaan antara objek pajak yang ditentukan dengan objek pajak yang sesungguhnya dilapangan.

Untuk mengetahui rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan/statement yang penulis berikan kepada responden, dapat kita lihat dari table berikut:

Tabel V.9: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pendaftaran dan Pendataan PBB di Kecamatan Rambah.

| No | Indikator | Kategori Jawaban | | | Jumlah |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Tidak Baik | |
| 1. | 1 | 28 | 63 | 26 | 117 |
| 2. | 2 | 21 | 58 | 38 | 117 |
| 3. | 3 | 19 | 57 | 42 | 117 |
| 4. | 4 | 24 | 59 | 36 | 117 |
| Jumlah | | 92 | 237 | 142 | 117 |
| Rata-Rata | | 23 | 59,25 | 35,5 | 117 |
| Persentase (%) | | 19,66 % | 50,64 % | 30,34% | (100%) |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari table rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pertanyaan/statement yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui

tanggapan responden mengenai *Pendaftaran dan Pendataan* mayoritas tanggapan responden mengatakan *Cukup Baik* sebesar 59 orang atau 50,63 %. Yaitu dalam pendaftaran dan pendataan PBB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi dalam pelaksanaan dilapangan belum optimal sepenuhnya baik itu dari segi pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak, dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 35,5 atau 30,34 %. Yaitu petugas belum sepenuhnya mendaftar dan mendata wajib pajak karena petugas tidak pernah turun kelapangan untuk mendaftar dan mendata wajib pajak secara langsung.

b. Proses Pemungutan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain :

1. Pencetakan formulir perpajakan
2. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
3. Penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah:

1. Kegiatan penghitungan pajak yang terhutang
2. Pengawasan
3. Penyetoran pajak
4. Dan penagihan pajak.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen (5 %) dari

hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Alokasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden tentang pemungutan PBB dilakukan oleh kolektor yang berwenang terhadap wajib pajak di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Tentang Pemungutan PBB Dilakukan Oleh Kolektor Yang Berwenang Terhadap Wajib Pajak di Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Baik | 19 | 16,24 % |
| 2. | Cukup Baik | 67 | 57,27 % |
| 3. | Kurang Baik | 31 | 26,49 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tanggapan responden sebesar 67 orang atau 57,27 % mengatakan *Cukup Baik* terhadap pemungutan PBB dilakukan oleh kolektor yang berwenang terhadap wajib pajak. Yaitu pemungutan PBB telah dilakukan kolektor yang berwenang secara rutin tetapi proses pemungutannya tidak di awal tetapi di akhir-akhir batas waktu pembayaran sehingga sedikit menyulitkan bagi wajib pajak untuk membayar, dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 31 atau 26,49 %. Yaitu pemungutan PBB yang dilakukan kolektor yang berwenang tidak secara rutin melainkan di akhir-akhir

batas waktu pembayaran baru kolektor datang untuk melakukan pemungutan sehingga menyulitkan wajib pajak untuk membayar bahkan enggan untuk membayar.

Selanjutnya tanggapan responden tentang prosedur dalam pemungutan PBB wajib pajak mampu mengikutinya di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Tentang Prosedur Dalam Pemungutan PBB Wajib Pajak Mampu Mengikutinya di Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Baik | 24 | 20,51 % |
| 2. | Cukup Baik | 59 | 50,43 % |
| 3. | Kurang Baik | 36 | 30,77 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tanggapan responden sebesar 59 orang atau 50,43 % mengatakan *Cukup Baik* terhadap prosedur dalam pemungutan PBB. Yaitu prosedur pemungutan yang telah ditetapkan, sebelumnya telah disosialisasikan kepada wajib pajak bagaimana sistem dalam pemungutan PBB tetapi tidak semua dari wajib pajak yang mampu mengikuti prosedur dalam pemungutan PBB karena tingkat pendidikan wajib pajak itu berbeda-beda sehingga untuk memahami prosedur pemungutan PBB sulit. dan ada juga

responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 36 atau 30,77 %. Yaitu petugas tidak pernah mensosialisasi prosedur pemungutan PBB sehingga wajib pajak tidak mengerti prosedur dalam pemungutan PBB karena tingkat pendidikan wajib pajak kebanyakan rendah sehingga untuk memahami prosedur pemungutan PBB sulit.

Selanjutnya tanggapan responden tentang hambatan yang di alami oleh petugas/kolektor pada saat pemungutan pajak di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Tentang Hambatan Yang di Alami Oleh Petugas/Kolektor Pada Saat Pemungutan Pajak di Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Baik | 19 | 16,24 % |
| 2. | Cukup Baik | 57 | 48,72 % |
| 3. | Kurang Baik | 42 | 35,90 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tanggapan responden sebesar 57 orang atau 48,72 % mengatakan *Cukup Baik* terhadap hambatan yang di alami oleh petugas/kolektor pada saat pemungutan pajak. Yaitu hambatan ini telah diselesaikan petugas/kolektor diantaranya melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak bahwa betapa pentingnya membayar pajak sebagai salah satu sumber

penerimaan daerah sehingga dapat menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak terkadang bahasa dalam penyuluhan terlalu tinggi sehingga susah bagi wajib pajak untuk memahaminya, dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 42 atau 35,90 %. Adapun hambatan yang belum diselesaikan oleh petugas yaitu petugas tidak pernah memberi pengarahan kepada wajib pajak sehingga pemungutan PBB terhambat karena kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai pajak.

Selanjutnya tanggapan responden tentang peraturan pemungutan yang dilakukan oleh petugas kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Tentang Peraturan Pemungutan Yang Dilakukan Oleh Petugas Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Baik | 21 | 17,95 % |
| 2. | Cukup Baik | 58 | 49,57 % |
| 3. | Kurang Baik | 38 | 32,48 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tanggapan responden sebesar 58 orang atau 49,57 % mengatakan *Cukup Baik* terhadap peraturan pemungutan yang dilakukan oleh petugas. Yaitu peraturan dalam pemungutan pajak sudah baik oleh petugas PBB tetapi dalam prakteknya wajib pajak masih dipersulit dengan administrasi yang berbelit-belit karena kebanyakan dari wajib pajak

berpendidikan rendah, dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 39 atau 32,48 %. Alasannya wajib pajak bingung terhadap peraturan pemungutan pajak yang mayoritas berpendidikan rendah dengan sistem administrasi yang berbelit-belit sehingga wajib pajak menjadi enggan untuk membayar pajak karena petugas tidak pernah melakukan penyuluhan terhadap peraturan pemungutan kepada wajib pajak.

Untuk mengetahui rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan/statement yang penulis berikan kepada responden, dapat kita lihat dari table berikut:

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pemungutan PBB di Kecamatan Rambah.

| No | Indikator | Kategori Jawaban | | | Jumlah |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Tidak Baik | |
| 1. | 1 | 19 | 67 | 31 | 117 |
| 2. | 2 | 24 | 59 | 36 | 117 |
| 3. | 3 | 19 | 57 | 42 | 117 |
| 4. | 4 | 21 | 58 | 38 | 117 |
| Jumlah | | 83 | 241 | 147 | 117 |
| Rata-Rata | | 20,75 | 60,25 | 36,75 | 117 |
| Persentase (%) | | 17,74 % | 51,50 % | 31,41% | (100%) |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari table rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pertanyaan/statement yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai *Pemungutan* mayoritas tanggapan responden

mengatakan *Cukup Baik* sebesar 60,25 orang atau 51,50 %. Yaitu dalam *Pemungutan* PBB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi dalam proses pemungutannya masih terdapat hambatan- hambatan yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak pada proses pemungutan PBB yang berakibat penerimaan belum optimal sepenuhnya baik itu dari segi jumlah dan waktu, dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 36,75 atau 31,41 %. Yaitu petugas belum sepenuhnya melakukan pemungutan terhadap wajib pajak karena petugas jarang turun kelapangan untuk melakukan pemungutan terhadap wajib pajak secara langsung sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

c. Proses Penyuluhan

Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi responden atau wajib ajak dalam partisipasi dan disiplin membayar Pajak Bumi dan Bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar, pengalaman dan pengetahuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat.

Tanggapan responden tentang penyuluhan yang dilakukan oleh petugas terhadap wajib pajak PBB di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh Petugas Terhadap Wajib Pajak PBB di Kecamatan Rambah.

| No | Frekuensi Penyuluhan PBB | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 1. | Baik | 22 | 18,80 % |
| 2. | Cukup Baik | 53 | 45,30 % |
| 3. | Kurang Baik | 48 | 41,03 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tanggapan responden sebesar 58 orang atau 49,57 % mengatakan *Cukup Baik* terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh petugas terhadap wajib pajak PBB. Yaitu penyuluhan yang dilakukan petugas kepada wajib pajak cukup baik, melalui perangkat desa/kelurahan, dengan di adakan penyuluhan ini akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tetapi tidak semua dari petugas melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak. selanjutnya ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 48 atau 41,03 %. Alasannya penyuluhan yang dilakukan oleh petugas PBB tidak sampai kepada wajib pajaknya melainkan hanya sampai pada perangkat desa/kelurahan, sehingga wajib pajak tidak mengetahui mengenai pajak.

Selanjutnya tanggapan responden tentang penyuluhan bisa memberikan kesadaran wajib pajak PBB di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 : Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Bisa Memberikan Kesadaran Wajib Pajak PBB di Kecamatan Rambah.

| No | Frekuensi Penyuluhan PBB | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 1. | Bermanfaat | 22 | 18,80 % |
| 2. | Cukup Bermanfaat | 49 | 41,89 % |
| 3. | Kurang Bermanfaat | 52 | 44,44 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tanggapan responden sebesar 58 orang atau 49,57 % mengatakan *Cukup bermanfaat* terhadap penyuluhan bisa memberikan kesadaran wajib pajak PBB. Yaitu penyuluhan cukup berpengaruh sekali dalam partisipasi masyarakat dalam membayar pajak apalagi bisa memberikan kesadaran kepada wajib pajak yang sebelumnya belum mendaftarkan objek pajak setelah mengetahui hal tersebut wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya. selanjutnya ada juga responden mengatakan *Kurang Bermanfaat* sebesar 52 atau 44,44 %. Alasannya penyuluhan yang dilakukan oleh petugas PBB tidak pernah sampai kepada wajib sehingga wajib pajak tidak mengetahui mengenai hal ini membuat wajib pajak tidak/ enggan membayar pajak.

Selanjutnya tanggapan responden tentang manfaat yang dirasakan dari penyuluhan di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.17 : Tanggapan Responden Tentang Manfaat Yang Dirasakan Dari Penyuluhan di Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Bermanfaat | 21 | 17,95 % |
| 2. | Cukup Bermanfaat | 58 | 49,57 % |
| 3. | Kurang Bermanfaat | 38 | 32,48 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tanggapan responden sebesar 58 orang atau 49,57 % mengatakan *Cukup Bermanfaat* terhadap manfaat yang dirasakan dari penyuluhan. Yaitu penyuluhan oleh petugas cukup bermanfaat dalam partisipasi masyarakat membayar pajak apalagi bisa memberikan kesadaran kepada wajib pajak yang sebelumnya belum mendaftarkan objek pajak setelah mengetahui hal tersebut wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya. selanjutnya ada juga responden mengatakan *Kurang bermanfaat* sebesar 38 atau 32,48 %. Alasannya penyuluhan yang dilakukan oleh petugas PBB tidak pernah sampai kepada wajib pajak sehingga wajib pajak kurang merasakan manfaat dari pajak itu sendiri.

Selanjutnya tanggapan responden tentang berapakah penyuluhan yang dilakukan oleh petugas PBB dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.18 : Tanggapan Responden Tentang Berapakah Menurut Saudara Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh petugas PBB Di Kecamatan Rambah

| No | Kriteria | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Pernah | 19 | 16,24 % |
| 2. | Kadang-kadang | 57 | 48,72 % |
| 3. | Tidak Pernah | 42 | 35,90 % |
| Jumlah | | 117 | 100% |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas tanggapan responden sebesar 57 orang atau 48,72 % mengatakan *Kadang-kadang* terhadap berapakah penyuluhan yang dilakukan oleh petugas PBB. Yaitu dengan penyuluhan yang dilakukan petugas secara periodik maka akan meningkatkan kesadaran membayar pajak tetapi tidak semua dari wajib pajak yang merasakan penyuluhan dari petugas PBB tersebut kerana tidak semua dari petugas melakukan penyuluhan. selanjutnya ada juga responden mengatakan *Tidak Pernah* sebesar 42 atau 35,90 %. Alasannya penyuluhan yang dilakukan oleh petugas PBB tidak pernah sampai kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak pernah merasakan manfaat dari penyuluhan oleh petugas pajak itu sendiri.

Untuk mengetahui rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan/statement yang penulis berikan kepada responden, dapat kita lihat dari table berikut:

Tabel V.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Penyuluhan PBB di Kecamatan Rambah.

| No | Indikator | Kategori Jawaban | | | Jumlah |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Tidak Baik | |
| 1. | 1 | 22 | 53 | 48 | 117 |
| 2. | 2 | 22 | 49 | 52 | 117 |
| 3. | 3 | 21 | 58 | 38 | 117 |
| 4. | 4 | 19 | 57 | 42 | 117 |
| Jumlah | | 84 | 217 | 180 | 117 |
| Rata-Rata | | 21 | 54,25 | 45 | 117 |
| Persentase (%) | | 17,95 % | 46,37 % | 38,46% | (100%) |

Sumber Data : Hasil Olahan Penelitian Tahun 2012

Dari table rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pertanyaan/statement yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai *Penyuluhan* mayoritas tanggapan responden mengatakan *Cukup Baik* sebesar 54 orang atau 46,37 %. Yaitu penyuluhan periodik/berkala yang dilakukan oleh petugas sangat dibutuhkan walaupun tidak optimal dalam prakteknya, masih ada sebagian wajib pajak yang belum terjamahi oleh petugas penyuluhan sehingga wajib pajak tidak mengetahui manfaat dari pajak tersebut, hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak tersebut. Dan ada juga responden mengatakan *Kurang Baik* sebesar 45 atau 38,46 %. Yaitu

penyuluhan secara periodik/berkala oleh petugas tidak terlaksana buktinya masih terdapat wajib pajak yang tidak merasakan penyuluhan sehingga wajib pajak beranggapan bahwa tidak ada manfaat membayar pajak bagi mereka.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah *Cukup Baik*, namun dalam penerapannya dilapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Berpedoman pada tabel-tabel frekwensi dan uraian yang telah dituangkan diatas, maka dapat digeneralisasikan atau disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu *Cukup Baik* untuk mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Tentunya tuntutan ini perlu diperhatikan dengan serius, karena bagaimanapun dengan berbagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Hal ini dimungkinkan karena Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan

ketentuan Perda Nomor 15 Tahun 2008 adalah pendaftaran dan pendataan, pemungutan, dan penyuluhan.

Dengan demikian, rangkaian mekanisme kerja yang harus di optimalkan pihak intern Dispenda Kabupaten Rokan Hulu sebagai kebijaksanaan yang diambil dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan supaya seluruh potensi wajib pajak yang ada dapat tergali, sehingga menambah pemasukan jumlah pajak yang akan dipungut tentunya melalui penetapan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

5.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

- a. Pendaftaran dan pendataan : tidak semua wajib pajak yang mau mendaftarkan objek pajaknya kepada petugas PBB, sehingga proses pendaftaran dan pendataan bisa optimal.
- b. Pemungutan : proses pemungutan masih belum optimal, masih ada diantara wajib pajak yang belum membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktu pembayaran.
- c. Penyuluhan : proses penyuluhan yang dilakukan petugas PBB belum optimal dikarenakan tempat dan lokasi wajib pajak terkadang tidak sama, sehingga menyulitkan penyuluhan bagi petugas .
- d. Kurangnya kesadaran wajib pajak : dimana wajib pajak tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktu yang telah ditentukan, sehingga mempengaruhi kurang lancarnya proses pemungutan

pajak, artinya wajib pajak belum memahami pentingnya membayar pajak sebagai sumber penerimaan daerah, mereka beranggapan bahwa pajak sama sekali tidak ada manfaat bagi mereka, membayar pajak juga tidak ada hasil bagi mereka karena mereka tidak merasakan pembangunan di daerahnya.

- e. Tidak ada petugas di kecamatan yang paham betul soal PBB : maksudnya disini Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum memahami dan terampil dalam pekerjaan dalam masalah PBB, sehingga dalam prakteknya dilapangan masih belum optimal baik itu dari segi pendaftaran dan pendataan, pemungutan, dan penyuluhan, yang berakibat kurang optimalnya pemungutan PBB di Kecamatan Rambah.
- f. Pelayanan yang diberikan oleh petugas belum maksimal : artinya petugas belum memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak yaitu wajib pajak harus pergi membayar ke kantor pajak yang mana kantor pajak tersebut jauh dari tempat tinggal mereka, disini petugas hendaknya memberikan solusi bagaimana wajib pajak mudah dalam pembayaran pajak tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tersebut, tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis mengambil suatu kesimpulan atau interpretasi dan diakhiri dengan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan bab tertentu.

Kesimpulan dan saran-saran yang penulis maksudkan di usakan sedemikian rupa sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas mengenai materi-materi yang telah di utarakan ada penulisan skripsi ini :

6.1 Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu *Cukup Baik*, namun dalam prakteknya dilapangan masih belum tepat sasaran atau belum efektif dengan kata lain target dan realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah Tahun 2011 realisasinya belum sesuai apa yang ditargetkan Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dapat dilihat pada bab sebelumnya yaitu pada tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah di targetkan sebesar Rp. 403.573.931,00 dan terealisasi sebesar Rp. 197.751.226,00 atau sekitar 49 % (persen).

2. Sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah dikatakan *Cukup Baik* terlihat dari pertanyaan/statment berikut ini :

- a. Tanggapan responden mengenai *Pendaftaran dan Pendataan* PBB di Kecamatan Rambah, 23 atau 19,66 % responden mengatakan *Baik*, 59,25 atau 50,64 % responden mengatakan *Cukup Baik*, dan selebihnya 35,5 atau 30,34 % responden mengatakan *Kurang Baik*. Jadi mayoritas tanggapan responden pada penelitian ini adalah *Cukup Baik*.
- b. Tanggapan responden mengenai *Pemungutan* PBB di Kecamatan Rambah, 20,75 atau 17,74 % responden mengatakan *Baik*, 60,25 atau 51,50 % responden mengatakan *Cukup Baik*, dan selebihnya 36,75 atau 31,41 % responden mengatakan *Kurang Baik*. Jadi mayoritas tanggapan responden pada penelitian ini adalah *Cukup Baik*.
- c. Tanggapan responden mengenai *Penyuluhan* PBB di Kecamatan Rambah, 21 atau 17,95 % responden mengatakan *Baik* terhadap penyuluhan PBB, 54,25 atau 46,37 % responden mengatakan *Cukup Baik* terhadap penyuluhan PBB, dan selebihnya 45 atau 38,46 % responden mengatakan *Kurang Baik* terhadap penyuluhan PBB. Jadi mayoritas tanggapan responden pada penelitian ini adalah *Cukup Baik*.

Maka dapat digeneralisasikan atau disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu *Cukup Baik* untuk mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu

6.2 Saran-saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas maka berikut ini akan diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu kiranya dukungan dari semua pihak baik itu masyarakat selaku wajib pajak dan termasuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Rokan Hulu.
2. Perlu di tingkatkan motivasi kerja personil Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Perlu diberikan sanksi administrasi yang tegas (Punishment) dan penghargaan (Reward) kepada masyarakat dan personil atau pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Rokan Hulu sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai terutama dalam meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal penetapan target pajak di Kabupaten Rokan Hulu harus sesuai dengan realisasi yang ada, sehingga pemungutan pajak di Kabupaten Rokan Hulu betul-betul efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Bohari, *Pengantar Hukum Perpajakan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Didin Hafidhudin dalam Skripsi Marzan, *Pajak Dalam Pandangan Islam*, 2007

Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, 2003.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

M. J. H. Smeeths (dalam Bohari, 2001:23), *Pengantar Hukum Perpajakan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Pandiangan, Liberty, *Pemahaman Praktisi Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Pajak Bumi dan Bangunan (seri Perpajakan), Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Prof. Dr. Rahmat Soemitro, SH dalam Sri Pudjatmoko dan Prof. PJA. Adriani, *Pengertian Perpajakan, Jakarta*. (2002:2).

Pudyatmoko, Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, 2002.

Richard A. Musgrave, Peggy B Musarave, *Meningkatkan Pajak Sebagai Sumber Utama Dana Pembangunan, Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia Substansi dan Urgensi*, PT, Gramedia, Jakarta, 2000.

Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Bandung, 1999:149

Soeparman dalam Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan*. Bandung: Alfabeta, (2003;4).

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan. Konsep, Teori, dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2006).

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta, Kencana, 2006.

Siagian , Sondang P, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Siagian , Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Siagian , Sondang P, Dalam Skripsi Marzan, *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu*, Pekanbaru 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; 705;1991.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi PBB.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.